

Pelatihan dan Pendampingan

Tim Penilai BLUD di Pemerintah Daerah







Latar Belakang

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sistem yang diterapkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT/D) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memiliki beberapa fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. BLUD memiliki fleksibilitas yang dapat digunakan oleh UPT/D dalam menunjang kinerjanya. UPT/D untuk dapat mengajukan penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Salah satu persyaratan yang paling penting untuk diperhatikan adalah persyaratan administratif karena terdapat beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Dokumen administratif terdiri dari Surat Pernyataan Kesiapan Meningkatkan Kinerja, Surat Pernyataan Bersedia Diaudit, Standar Pelayanan Minimal, Pola Tata Kelola, Rencana Strategi Bisnis, dan Laporan Keuangan Pokok. Seluruh dokumen persyaratan administratif harus lolos tahap penilaian setelah pengajuan status BLUD.

Menurut Permendagri 79 tahun 2018, Kepala Daerah akan melakukan penilaian terhadap permohonan pengajuan status BLUD oleh UPT/D dengan membentuk sebuah tim penilai yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Tim penilai BLUD juga dapat melibatkan tenaga-tenaga ahli yang berkompeten pada bidangnya masing-masing. Tim penilai memiliki tugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD berupa dokumen-dokumen administratif paling lama 3 (tiga) bulan. Tim penilai dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Tujuan inti dibentuknya tim penilai BLUD adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan BLUD di suatu Perangkat Daerah agar beroperasi sesuai dengan kaidah secara substantif, teknis, dan administratif serta untuk menyatakan BLUD terkait telah benar-benar layak untuk menjalankan fungsinya.

Pemda dalam membentuk Tim Penilai BLUD memiliki berbagai permasalahan dan kendala antara lain:



- 1. Penentuan siapa yang dapat menjadi Tim Penilai pengajuan penerapan BLUD**
- 2. Alur dalam melakukan penilaian BLUD**
- 3. Landasan hukum dalam penilaian BLUD**
- 4. Serah terima hasil penilaian BLUD**
- 5. Tindak lanjut setelah melakukan penilaian terhadap UPT/D yang ingin menerapkan BLUD**

Solusi Permasalahan BLUD



Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemda memerlukan pendampingan dan pelatihan dalam penyusunan tim penilai untuk menilai UPT/D yang akan menerapkan BLUD.

Untuk mendukung hal tersebut kami memiliki layanan berupa:

1
Pelatihan Tim Penilai BLUD di Pemerintah Daerah

2

Pendampingan Tim Penilai BLUD di Pemerintah Daerah



Pelatihan Tim Penilai BLUD di Pemerintah Daerah



Pelatihan Tim Penilai BLUD di Pemerintah Daerah ini adalah pelatihan yang memberikan penjelasan tentang bagaimana menyusun tim penilai, melakukan penilaian terhadap UPT/D yang ingin menerapkan BLUD

sesuai Penilaian BLUD mengacu pada SE Mendagri No 900 tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian BLUD, dan mampu memahami alur penilaian BLUD hingga pemberian hasil penilaian BLUD dengan tepat sesuai jangka waktu penilaian.

o Pelatihan ini dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompeten dalam mendampingi pengajuan pola pengelolaan keuangan BLUD.

o Pelatihan dilakukan selama 3 (tiga) hari dengan jadwal dan materi yang telah disusun oleh Tim Syncore BLUD.

Rincian jadwal pelatihan sebagai berikut:

Modul	Hari	PIC/Mentor
Dasar hukum, Ketentuan penilaian, dan Tujuan Penerapan BLUD	Hari ke-1	Tenaga Ahli
Mekanisme Penilaian Syarat Administratif BLUD sesuai Peraturan Perundang-undangan.		
Proses Penilaian Dokumen Tata Kelola	Hari ke-2	Tim Konsultan
Proses Penilaian Dokumen Rencana Strategis		
Proses Penilaian Dokumen Standar Pelayanan Minimal	Hari ke-3	Tim Konsultan dan Tenaga Ahli
Proses Penilaian Dokumen Laporan Keuangan		
Proses Penyusunan Dokumen Hasil Penilaian BLUD		
Langkah Setelah Melakukan Penilaian		

2

Pendampingan Tim Penilai BLU di Pemerintah Daerah



Pendampingan Tim Penilai merupakan pendampingan dalam melakukan penilaian kepada UPT/D yang akan menerapkan BLUD di lingkungan pemerintah daerah.

- o Pendampingan ini diawali dengan Pelatihan Tim Penilai yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah daerah secara tatap muka.

- o Dilanjutkan dengan pendampingan selama tiga (3) bulan terhitung sejak pelatihan tim penilai dilaksanakan.

Pendampingan Tim Penilai BLU di Pemerintah Daerah (3 bulan)

1

Pelatihan Tim Penilai BLUD

Peserta mampu memahami materi, dasar hukum, dan konsep dalam melakukan penilaian terhadap UPT/D yang akan menerapkan BLUD

2

Pendampingan Tim Penilai BLUD

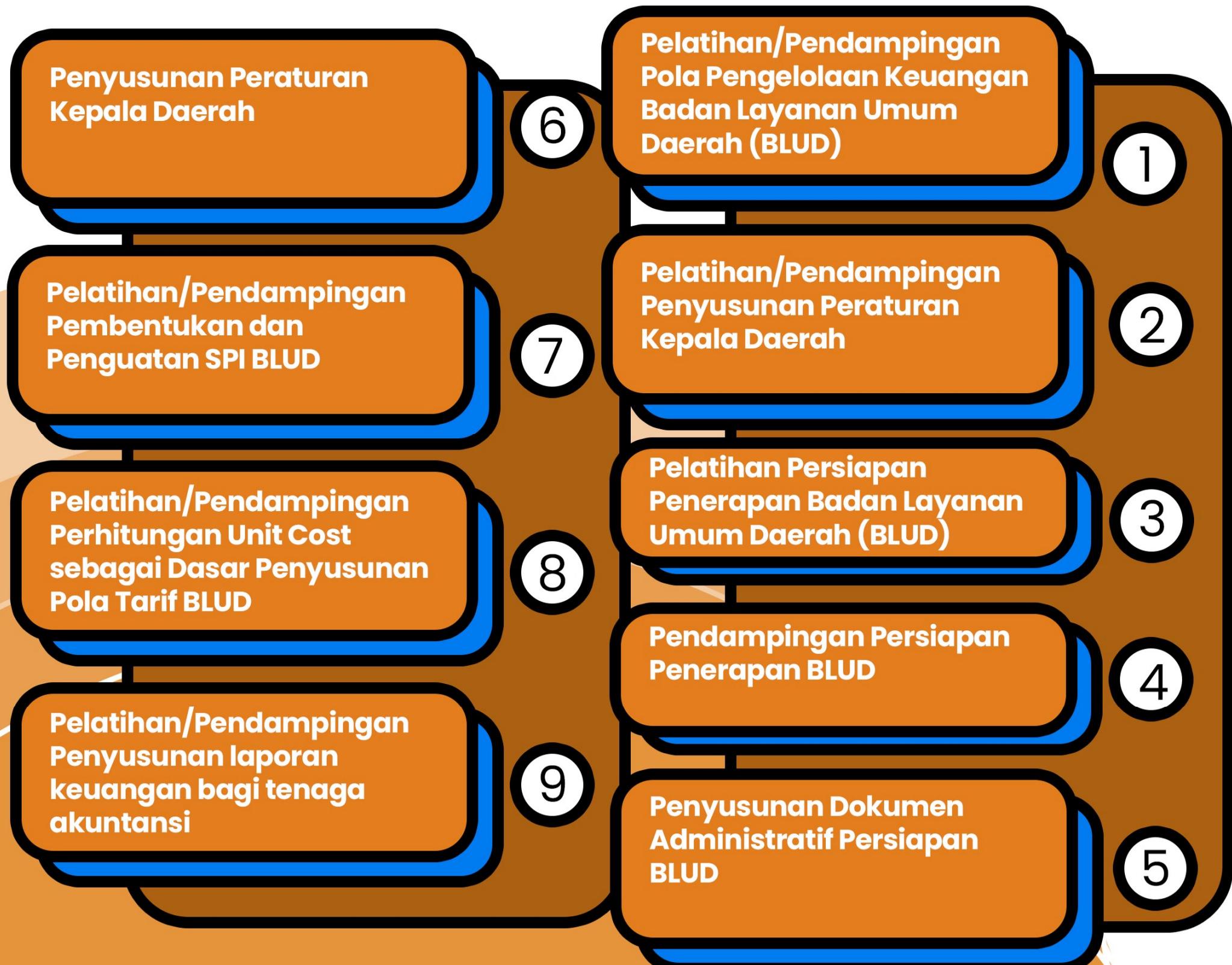
Sebagai tindak lanjut dari pelatihan selanjutnya memberikan pendampingan terhadap Tim Penilai BLUD dalam melakukan penilaian untuk UPT/D yang akan menerapkan BLUD.

Output Dari pendampingan:

Dokumen Hasil Penilaian BLUD

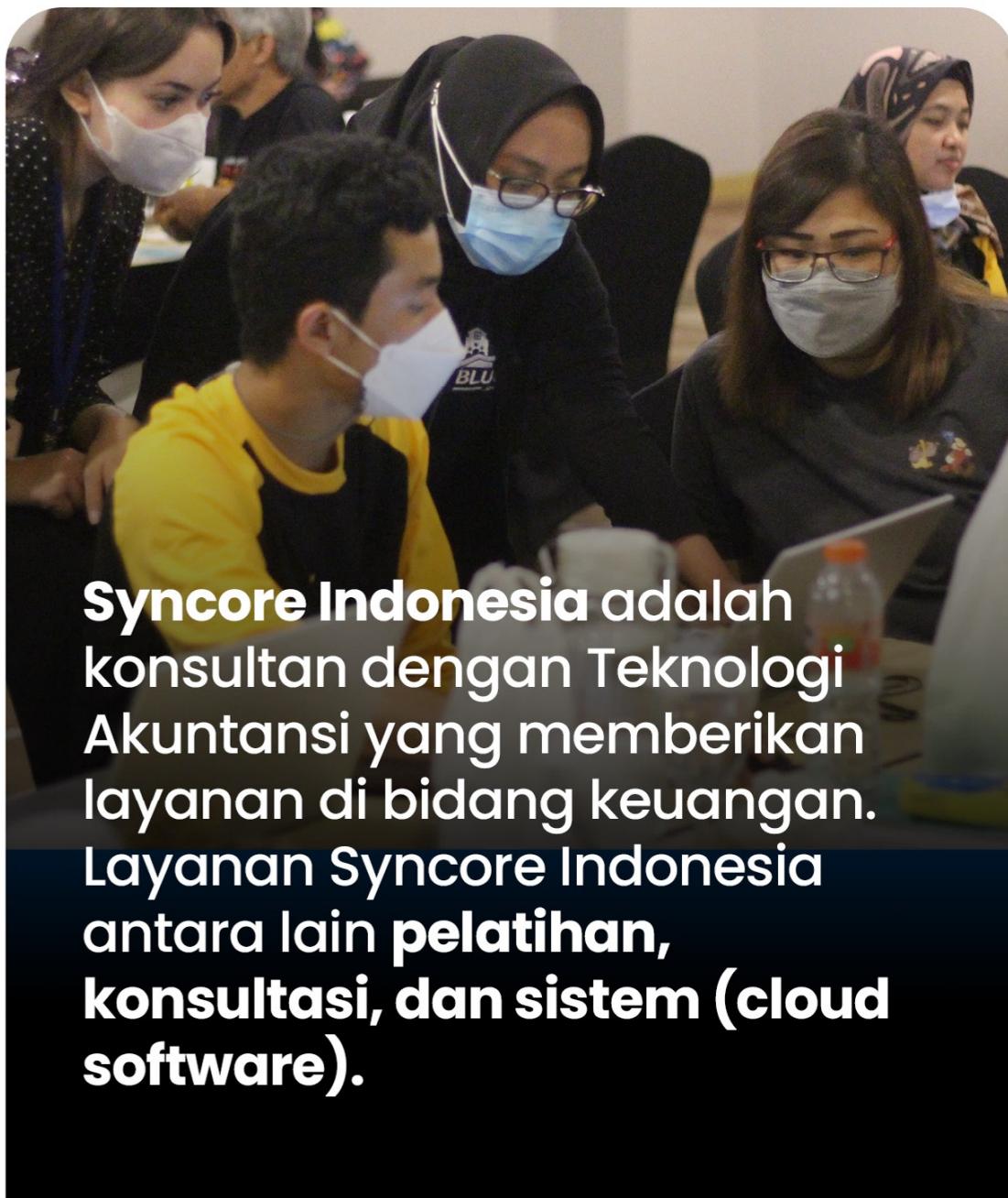
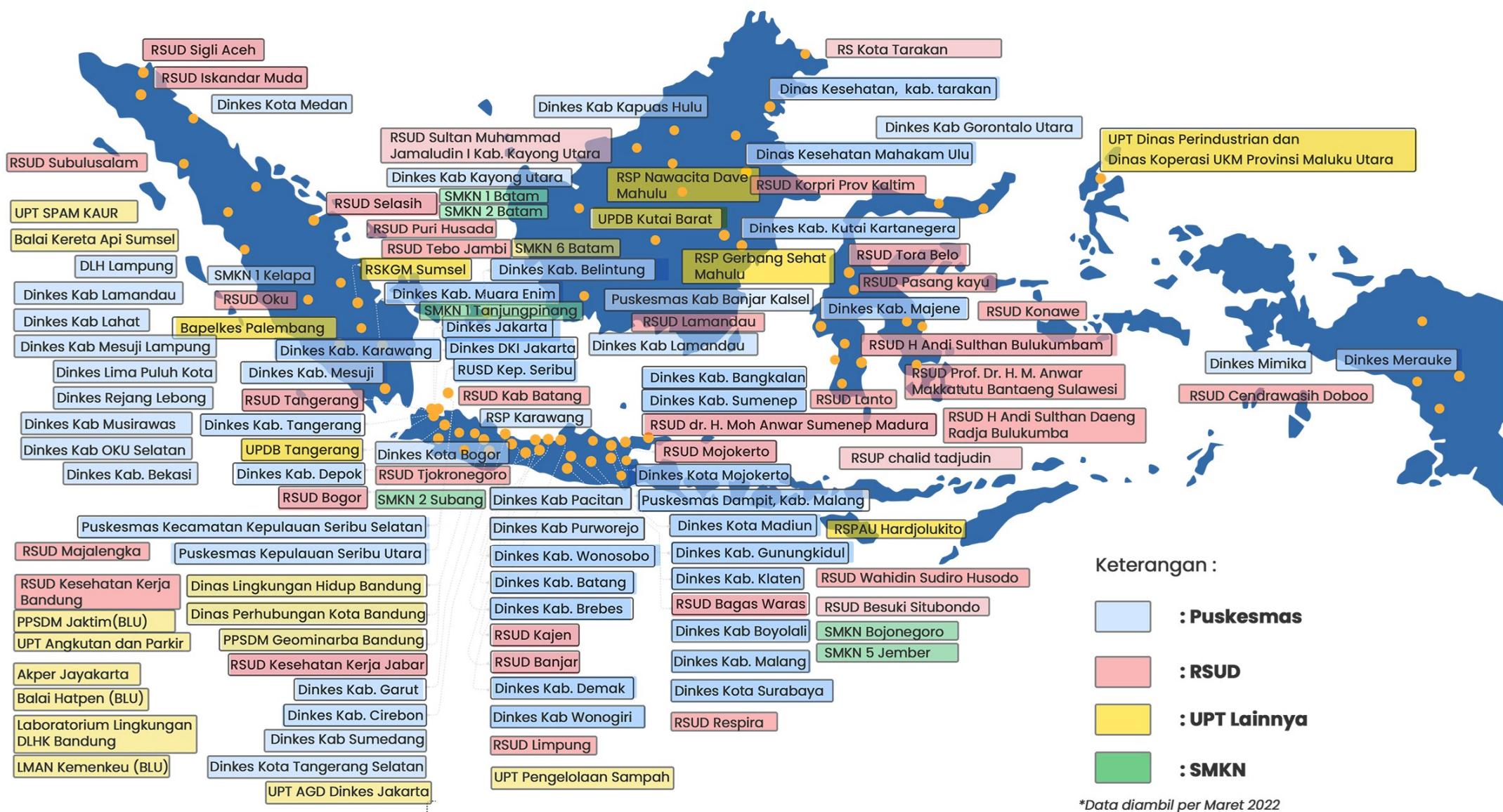
Layanan Pelatihan dan Pendampingan **Syncore BLUD Lainnya**

Untuk menunjang terlaksananya implementasi penerapan BLUD sesuai dengan peraturan berlaku, Syncore BLUD memberikan layanan berupa:



Profile BLUD

Peta Mitra Syncore BLUD



Syncore Indonesia berdiri sejak 9 Juli 2010 yang memberikan jasa konsultan manajemen bisnis dan keuangan. Seiring dengan perkembangan zaman, Syncore Indonesia kini memberikan layanan di bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD). Didukung dengan tenaga profesional yang berpengalaman di bidang keuangan, kami telah mendampingi lebih dari 1.100 instansi, baik Badan Layanan Umum maupun Badan Layanan Umum Daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Narasumber



Niza Wibyana Tito M.Kom., M.M, CAAT

Bertindak selaku konsultan teknologi informasi, tenaga ahli serta **narasumber BLUD yang berpengalaman dalam melakukan lebih dari 1000 pelatihan dan pendampingan**. Beliau juga terlibat dalam pengembangan aplikasi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan BLUD.

Partner Narasumber Dan Praktisi



Dr Rudy Suryanto, SE, M.Acc., Ak., CA

Dosen Akuntansi
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta, mantan
auditor senior,
berpengalaman lebih 300
(tiga ratus) pelatihan dan
pendampingan.

Andri Yandono, SE, MM

Dewan pengawas RSUD
Kota Yogyakarta dan
RSUD Panembahan
Senopati Bantul, Kepala
Keuangan RSUD
Panembahan Senopati
Bantul, tim penilai BLUD
Kabupaten Bantul.

Soni Haksomo, SE, M.Si

Kasubag keuangan
RSUD Kota Yogyakarta

- **Tim pendamping BLUD Syncore**

Partner

PARTNER KAMI



Dinkes Kabupaten Lahat
Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BEKASI



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKABUMI



Dinas Kesehatan
Kabupaten Musi Rawas Utara



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN REJANG LEBONG



Dinas Kesehatan
Kab. Lima Puluh Kota



Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamandau



PUSKESMAS SURADE
KABUPATEN SUKABUMI



Dinas Kesehatan
Kabupaten Purworejo



DINAS KESEHATAN
KOTA MEDAN



Dinas Kesehatan
Kabupaten Banjar



PUSKESMAS GUNUNG LINGKAS
KOTA TARAKAN



UNIT PELAYANAN
AMBULANS GAWAT DARURAT
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DKI JAKARTA



SMKSAB
SMK NEGERI 1 BATAM



UNIT PELAYANAN
AMBULANS GAWAT DARURAT
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DKI JAKARTA



DINAS KOPERINDAG
KABUPATEN KUTAI BARAT



Lembaga
Manajemen
Aset
Negara



DISHUB
Kota Bandung



ppsdm
GEOMINERBA



Partner



Partner

PARTNER KAMI



Dinas Kesehatan Kabupaten
Kutai Kartanegara



DINAS KESEHATAN
KOTA MALANG



DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KOTA SAMARINDA



DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN



DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KULON PROGO



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS KESEHATAN



DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SUMENEP



DINKES
KOTA SERANG



Rumah Sakit Umum Daerah
dr. H. Marsidi Judono



DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAYONG UTARA



RSUD MUARADUA
OKUSELATAN



RSUD CENDRAWASIH
KEPULAUAN ARU



RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA
KABUPATEN BULUKUMBA

Partner



RSUD PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT



RSUD LANTO DAENG PASEWANG
KABUPATEN JANEPOUTO



RSUD KAUR
KABUPATEN BENGKULU



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NURDIN HAMZAH



DINAS CIPTAKARYA
MANGGARAI TIMUR



DLH Provinsi
LAMPUNG

DisKopUMK
Kota Cilegon



Lembaga
Manajemen
Aset
Negara

DINAS KOPERASI DAN UMKM
KOTA SOLOK

